

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN
KUANTITAS *BOKA* ADAT PERKAWINAN
SUKU MUNA DI KECAMATAN KATOBU
KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

KHAIRAH ZUL FITRAH

NIM: 10100114073

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan berdasarkan Q.S. an-Nūr ayat 31 dan Q.S. al-Azhab ayat 59, maka:

Nama : KHAIRAH ZUL FITRAH

NIM : 10100114073

Jurusan/Prodi : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Jalan Gassing Dg Tiro Dr. Wahidin Sudirohusodo

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto ijazah sarjana. Apabila kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya akan menanggung semua akibatnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Atas kebersamaan dan kebijakan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Gowa, 13 Agustus 2018

Pemohon

KHAIRAH ZUL FITRAH

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN KUANTITAS *BOKA* ADAT PERKAWINAN SUKU MUNA DI KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA", yang disusun oleh Andi Reski Putri, NIM: 10100114093, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 27 Agustus 2018 M
15 Dzulhijjah 1439H ✓

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Dr. Hamsir, S.H., M.Hum.

(.....)

Munaqisy I : Dr. Mohd. Sabri AR, M.Ag.

(.....)

Munaqisy II : Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.

(.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

(.....)

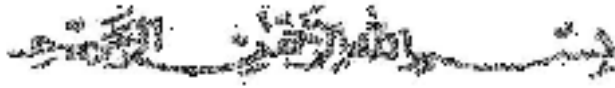
Pembimbing II : Dr. H. Supardin, M.H.I.

(.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah robbil ‘alamiin, segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak berkah kepada penyusun, diantaranya keimanan dan kesehatan serta kesabaran sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada-Nyalah penyusun menyerahkan diri dan menumpahkan harapan, semoga segala aktivitas dan produktivitas penyusun mendapatkan limpahan rahmat dari Allah swt.

Salam dan shalawat kepada Nabiullah Muhammad saw., keluarga, dan para sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam dan ummat yang mengikuti ajaran-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas *Boka* Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penulis menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat do’a, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini, banyak sekali pihak yang membantu Penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, maka Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, yakni Ayahanda Drs. H. Syaifuddin, MA dan Ibunda Almh. H. Sarni Gande, S.Ag. dengan penuh kasih sayang, pengorbanan serta dukungannya

baik berupa materi, nasehat, dan doa' yang tulus. Terima kasih juga untuk saudara-saudaraku tercinta Muammar Sholihin Syaidar, S.E. dan Muhammad Gazali Syaidar, S.T. serta saudari-saudariku Khairiatun Wardah, S.Kom, dr. Khairunnisa, dan Wd. Khairu Rizki Fitriah, serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat, restu dan doa'nya untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag., Wakil Dekan II Bapak Dr. Hamsir, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. dan Dr. H. Supardin M.H.I. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
5. Bapak Dr. H. Supardin M.H.I, selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Bapak Dr. Mohd. Sabri AR, M.Ag. dan Bapak Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag., selaku penguji yang telah memberikan saran dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyempurnaan skripsi.
7. Bapak Ketua Lembaga Adat Muna, yakni Bapak Ld. Silat Imbo dan para tokoh adat Muna yakni Bapak Drs. La Hosa, Bapak Idorum dan Bapak H. Ld. Aminu K., S.Ag., yang telah memberikan fasilitas, waktu, tempat dan bantuannya selama penelitian dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil.
8. Sahabat-sababat sekaligus teman seperjuangan saya, Andi Reski Putri, Nuraeni, dan Yuliyanti, S.H. Terima kasih untuk kesabaran dan dukungan semangat, serta semua bantuannya selama ini.
9. Teman-teman angkatan 2014 khususnya Kelas Peradilan Agama B yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua kebersamaan dan bantuannya selama ini.

10. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 57 Kecamatan Bontonompo, Desa Bontolangkasa, Muh. Agus, Nur Ayu Puspita Sari, Muttiara B, Laela Magfirah, Selfiana, Nur Azizah, dan Dede Shinta Dewi.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna di kemudian hari dalam memberikan informasi dan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat bernilai ibadah disisi Allah swt.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 26 Juli 2018

Penulis,

Khairah Zul Fitrah

Nim. 10100114073



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN...../.....	1-8
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	9-35
A. Tinjauan tentang <i>Boka</i> dan Adat Muna.....	9
1. Pengertian dan Sejarah <i>Boka</i>	9
2. Pengertian dan Sejarah Perkawinan Adat Muna.....	10
B. Hukum Adat secara Umum.....	11
C. Adat dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian ' <i>Urf</i> '.....	15
2. Macam-macam ' <i>Urf</i> '	24
3. Kehujjahan ' <i>Urf</i> '.....	25
4. Syarat-syarat ' <i>Urf</i> '.....	25
5. Kedudukan ' <i>Urf</i> ' sebagai sumber hukum	26

6. Alasan Adat dapat dijadikan dalil	28
7. Perlawanan ' <i>Urf</i> dengan dalil-dalil <i>syara</i> '	29
8. Syarat penggunaan Adat kebiasaan	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34-38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37
BAB IV PROSES PENENTUAN KUANTITAS <i>BOKA</i> ADAT	
PERKAWINAN SUKU MUNA DI KECAMATAN KATOBU KABUPATEN	
MUNA.....	39-51
A. Gambaran Umum Kecamatan Katobu	39
B. Penentuan Kuantitas <i>Boka</i> Adat Perkawinan Suku Muna.....	45
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas <i>Boka</i> Adat Perkawinan Suku Muna.....	48
D. Analisis tentang Kuantitas <i>Boka</i> Suku Muna.....	50
BAB V PENUTUP.....	52-53
A. Kesimpulan.....	52
B. Implikasi Penelitian.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathahdanyā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haura*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- at fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu"ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيّ	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby).

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: <i>al-syams (bukanasy-syam)</i>
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah (bukanaz-zalزالah)</i>
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsalah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilād</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūn</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnahqabl al-tadwin

Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

9. *Lafzal-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

دَيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wamā Muhammadunillārasul

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsiIallazi bi Bakkatamubāarakatan

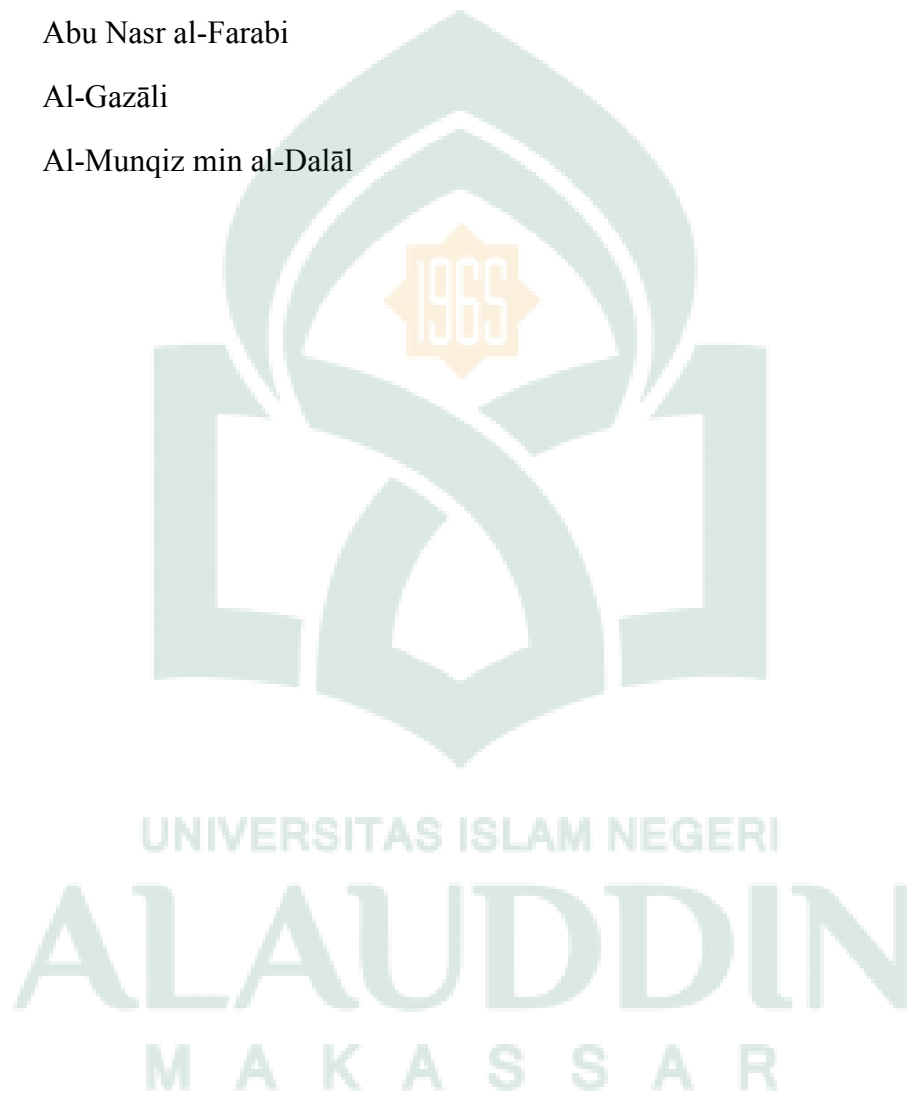
SyahruRamadān al-laziunzilaḥ al-Qur'ān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl



Abstrak

Nama : Khairah Zul Fitrah
Nim : 10100114073
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas *Boka* Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Pokok masalah penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas *Boka* Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1) Proses penentuan kuantitas *boka* pada adat perkawinan suku Muna.
- 2) Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan kuantitas *boka* pada adat perkawinan suku Muna.

Jenis penelitian tergolong *field research kualitatif deskriptif*, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian adalah tokoh adat suku Muna. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara. Lalu teknik pengolahan dan analisis data terdapat tiga tahapan: pengolahan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Kuantitas atau jumlah *boka* pada adat perkawinan suku Muna sudah ada ketentuannya sejak dahulu. Penentuan tersebut berdasarkan hasil musyawarah para tetua adat terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anak cucu hingga saat ini. *Boka* adalah satuan nilai yang disebut oleh mempelai laki-laki saat ijab qabul setelah menyebut mahar.
2. Adat *boka* adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah, adat *boka* merupakan suatu tradisi yang menjadi ciri khas atau identitas suku Muna. Akan tetapi, tidak semua masyarakat suku Muna mengetahui hal tersebut. Maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai hal ini agar masyarakat secara keseluruhan mengetahuinya. Banyak masyarakat Muna yang belum memahami dengan baik mengenai adat *boka* itu sendiri. Mereka hanya mengetahui dari orang tua mereka tanpa tahu perubahannya. Hal tersebut di dukung dengan didirikannya secara formal gedung Lembaga Adat Muna yang mempunyai struktur organisasinya pula.
2. Bagi masyarakat, tidak semua masyarakat mengetahui tentang adat *boka* ini. Maka dari itu, para orang tua perlu mempersiapkan anak-anaknya. Mereka sudah harus disosialisasikan mengenai adat istiadat dan tradisi suku Muna karena mereka adalah para penerus tradisi ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di dalamnya, yang disebut *al-ahwal asy-syakhshiyyah* (Hukum yang berkaitan dengan pernikahan, talak, mahar, keturunan dan lain-lain). Pernikahan merupakan suasana salihah yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman. Nikah juga merupakan ketenangan karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri.

Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga salihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara isteri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan, dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Rūm/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 406.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Didalam pernikahan, ada rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Adapun rukun nikah, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, dan shigat ijab kabul. Sedangkan syarat sah pernikahan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, syarat-syarat wali, syarat-syarat saksi, dan syarat-syarat ijab kabul.

Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur social dan kebudayaan sederhana. Hukum adat timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup di dalam system tersebut.² Adat merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih di jalankan dalam masyarakat. Adat biasa juga disebut dengan tradisi. Tradisi yang dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu sebagai tradisi. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap jika benda material dibuang atau gagasan di lupakan. Tradisi mungkin akan muncul kembali setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap aktif terhadap masa lalu.

²Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.338.

Tradisi dalam Islam dapat dipelajari dan dilihat dalam berbagai cara adalah sebuah kekeliruan yang sangat fatal bila tidak memandang tradisi rasional dalam islam dengan pandangan yang sangat luas sehingga mencakup hampir setiap hal dalam sejarah dan kebudayaan Islam. Hal ini tidak hanya berlaku bagi para ilmuwan dan filsuf tetapi berlaku juga dalam lirn teologi dan mistik, karena kapan saja mereka mencoba mengekspresikan diri mereka sendiri atau mengkomunikasikan pengalama-pengalaman mereka, mereka harus menggunakan akal dan oleh sebab itu berhubungan juga dengan tradisi rasional.³

Kebiasaan merupakan suatu tata cara hidup yang dianut oleh masyarakat atau suatu bangsa dalam waktu yang lama. Pada hakikatnya memberikan pedoman bagi masyarakat atau bangsa yang bersangkutan untuk berfikir dalam menghadapi berbagai hal kehidupan. Hukum adat atau *'urf* di Indonesia tidak mengenal system peraturan yang statis. Tiap-tiap hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, peraturan baru tersebut akan berkembang juga tetapi kemudian akan lenyap dengan perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. tidak semua kebiasaan yang mengandung hukum adat atau *'urf* yang baik dan adil, oleh karenanya belum tentu kebiasaan tersebut menjadi sumber hukum. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diterima masyarakat sesuai dengan kepribadian masyarakat yang kemudian berkembang menjadi hukum kekuasaan (adat/*'urf*).⁴

Tradisi atau adat istiadat di Indonesia sangatlah banyak. Utamanya dalam tradisi pernikahan di setiap daerahnya. Mereka memiliki tradisi turun temurun yang sudah berlaku sejak dahulu kala. Salah satunya adalah suku Muna yang terletak di Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Muna memiliki

³Farhad Daftary (ed.). *Tradisi-Tradisi Intelektual Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), h. 63-64.

⁴R. Soeroso, S. *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet.10; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 151.

ciri khas tersendiri dalam tradisi pernikahan yang akan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu kala yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh para penerusnya. Dalam melakukan perkawinan, suku Muna membaginya ke dalam empat golongan, yaitu golongan Koumu, golongan Walaka, golongan Anangkolaki atau Fitubengkauhano, dan golongan Mowanoliwu. Di suku Muna ada satu adat yang harus dipenuhi, biasa disebut dengan *Boka*.

Dahulu kala, keempat golongan tersebut hanya boleh menikah sesama dengan golongannya. Hal tersebut dikarenakan adanya batasan-batasan atau aturan-aturan yang harus dijalani oleh setiap golongannya. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, para penerus di setiap golongan melakukan perubahan terhadap adat istiadat tersebut secara perlahan-lahan. Sekarang keempat golongan tersebut boleh menikah dengan golongan apapun yang dalam hal ini salah satu dari ketiga golongan itu. Walaupun demikian, dalam penentuan adat bokanya sangat jelas perbedaannya. Jika sesama golongan Koumu menikah adatnya berupa 20 Boka Muna. Akan tetapi jika Koumu dengan golongan lain, diperbolehkan adatnya di bawah 20 Boka Muna. 1 Boka Muna itu sama dengan 24.000,00, yang dahulu itu 12.000,00.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan penentuan adat boka yang diklasifikasikan atas empat golongan, maka penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas *Boka* Pada Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara”**.

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan proses penentuan kuantitas atau jumlah adat *boka* berdasarkan tingkatan golongan serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan proses penentuan kuantitas *boka* tersebut.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian mengenai Penentuan Kuantitas *Boka* Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Penentuan kuantitas *boka* dalam adat perkawinan suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Adat perkawinan suku Muna ketika penentuan kuantitas atau jumlah *boka* yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan kuantitas *boka* dalam adat perkawinan suku Muna Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah, yaitu “Bagaimana proses penentuan kuantitas *boka* adat perkawinan suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara”. Penulis merumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penentuan kuantitas *boka* adat perkawinan suku Muna di Kabupaten Muna?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan kuantitas *boka* adat perkawinan suku Muna tersebut?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, masalah mahar sesungguhnya telah banyak di tulis secara teoritis di dalam literatur. Setelah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan tentang pembahasan ini, penulis menemukan beberapa buku, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, 2013. Buku ini memusatkan pembahasannya pada masalah-masalah yang termasuk dalam kajian perdata, salah satunya adalah tentang pernikahan. Dalam buku ini dipaparkan secara komprehensif apa yang dimaksud dengan pernikahan, dasar hukum pernikahan dan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Farhad Daftary (ed), Tradisi-Tradisi Intelektual Islam, 2002. Buku ini memusatkan pembahasannya pada tradisi. Dalam buku ini dipaparkan secara komprehensif bahwa tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih di jalankan dalam masyarakat. Tradisi yang dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu sebagai tradisi. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap jika benda material dibuang atau gagasan di lupakan. Tradisi mungkin akan muncul kembali setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap aktif terhadap masa lalu.
3. Prof. Abd. Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, 1994. Dalam buku ini memaparkan tentang pengertian adat dalam perfektif hukum islam atau '*Urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah di kenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi bagi masyarakat.

4. Drs. Sudarsono. S.H. M.Si, Kamus Hukum, 2007. Dalam kamus hukum ini menjelaskan tentang pengertian *adat*, *adat istiadat*, *hukum adat dan tradisi*.
5. Dr. H. Abdul Manan, S.H. S.IP, M.Hum., Reformasi Hukum Islam di Indonesia, 2006. Menjelaskan bahwa Adat kebiasaan atau biasa disebut dengan '*Urf*' yaitu suatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan. Sebagian ulama ushul fiqh, '*urf*' disebut juga adat sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat. Namun demikian, dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf*' lebih umum daripada pengertian adat, karena adat selain telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam penelitian yang dilakukan, penyusun berusaha menjelaskan proses tercapainya kesepakatan penentuan adat boka antara para pihak yang bersangkutan dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Penyusun menganalisis proses penentuan adat boka tersebut dengan tinjauan hukum Islam.

Dalam beberapa buku tersebut memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai tradisi atau adat istiadat. Akan tetapi, penyusun meneliti mengenai proses penentuan adat boka di Kabupaten Muna yang memiliki tata cara atau adat istiadatnya sendiri. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses penentuan kuantitas *boka* adat perkawinan suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penentuan kuantitas *boka* adat perkawinans suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis, Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya mahar.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi acuan dan pertimbangan masyarakat penerus yang akan datang dan pihak-pihak yang berkaitan, khususnya dalam proses penentuan adat boka.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan tentang Boka dan Adat Muna

1. Pengertian dan Sejarah Boka pada Adat Muna

a) Pengertian Boka

Dalam suku Muna, salah satu tradisi atau adat dalam perkawinan adalah *Boka*. ¹Boka adalah satuan nilai untuk mengukur besaran nominal suatu mata uang. Kendati demikian, boka bukanlah suatu alat pembayaran yang umum digunakan untuk transaksi jual beli atau alat tukar. Satuan boka hanya digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan suatu prosesi adat atau denda adat serta kegiatan keagamaan didalam masyarakat suku Muna, seperti pembayaran denda atas pelanggaran adat, pernikahan, dan lain sebagainya. Boka dalam bahasa Indonesia sama dengan padanan. Maksudnya adalah sebanding, senilai, atau seharga dengan golongannya.

Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”. ²

b) Sejarah Boka

³Sejarah lahirnya boka adalah berawal dari 24 ekor ayam tamboboro (ayam yang baru mengenal betina). Pemakaian istilah boka dimulai pada masa

¹ Ld. Imbo. Anak Raja Muna, Ketua Lembaga Adat Muna. *Wawancara melalui Handphone* (7 Desember 2017).

²Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Ed. 1. Cet. 6. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 100.

³ Ld. Imbo. Anak Raja Muna, Ketua Lembaga Adat Muna. *Wawancara melalui Handphone* (7 Desember 2017).

Raja Sugimanuru, yaitu pada abad ke-14 M. Setelah ada uang dirham, maka satu ekor ayam jantan muda atau tamboboro dinilai dengan satu ketip. Pada masa Raja Sugimanuru, maka ditetapkanlah tiga tingkatan atau status sosial, yaitu:

1. Golongan Koumu adalah golongan bangsawan dalam adat Muna, golongan keturunan La Ode bagi laki-laki dan Wa Ode bagi perempuan.
2. Golongan Anangkaloki atau Fitubengkauhano adalah golongan orang-orang yang menguasai perdagangan di Muna.
3. Golongan Mowanoliwu adalah golongan orang-orang yang memba'iat Raja.

Pada masa Raja Tittakono, sesudah Raja Sugimanuru ada golongan baru, yaitu Golongan Walaka atau Kabonto Balo adalah golongan yang berhak menjadi Perdana Menteri, mengatur adat, menetapkan hukum bersama Raja, memilih dan mengangkat Raja bahkan berhak menurunkan Raja dari jabatannya jika dianggap melanggar hukum negara dan hukum adat. Jadi, pada masa Raja Tittakono inilah lahir empat golongan, yaitu Golongan Koumu adatnya 20 boka muna, Golongan Walaka atau Kabonto Balo adatnya 10 boka 10 suku, Golongan Anangkaloki atau Fitubengkauhano adatnya 7 boka 2 suku, dan Golongan Mowanoliwu adatnya 3 boka 2 suku. Jumlah satu boka itu setara dengan Rp24.000. Keempat golongan ini digunakan saat terjadinya perkawinan di Muna.

2. Pengertian dan Sejarah Perkawinan Adat Muna

a) Pengertian Perkawinan Adat Muna

Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun sebuah rumah tangga guna menciptakan keturunan yang shaleh dan shalehah berdasarkan keridhaan Allah. Perkawinan dilaksanakan berdasarkan adat istiadat daerah masing-masing mempelai. Akan tetapi, biasanya pada prosesi perkawinan tersebut pihak mempelai laki-laki mengikuti adat istiadat

atau tradisi perkawinan mempelai perempuan jika kedua mempelai tersebut berbeda adat istiadatnya.

Seperti halnya perkawinan yang terjadi di Suku Muna. Diawali dengan datangnya beberapa orang perwakilan dari pihak laki-laki tanpa boleh dihadiri oleh kedua orang tua mempelai laki-laki. Mereka diwakili oleh sanak saudara dan orang-orang yang dianggap tua dalam adat. Kedatangan keluarga mempelai laki-laki tersebut dalam rangka pelamaran. Ketika lamarannya diterima oleh pihak mempelai perempuan, maka diadakanlah pertunangan antara keduanya. Selang dua sampai tiga bulan pertunangan, maka dilaksanakanlah perkawinan tersebut.⁴

b) Sejarah Perkawinan Adat Muna

Sejarah perkawinan di suku Muna mulai muncul setelah melihat ayam jantan muda (tamboboro) mengenal dan memburu ayam betina, kemudian terjadilah perkawinan atau hubungan seksual antara ayam jantan dan ayam betina tersebut.⁵

B. Hukum Adat secara Umum

Hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu sisi mempunyai sanksi (karena merupakan hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (karena merupakan adat). Sebagai sebuah hukum yang tidak dikodifikasi, hukum adat memiliki cakupan yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi 3 (tiga).⁶

⁴Ld. Imbo. Anak Raja Muna, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Muna. *Wawancara melalui Handphone* (7 Desember 2017).

⁵Ld. Imbo. Anak Raja Muna, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Muna. *Wawancara melalui Handphone* (7 Desember 2017).

⁶Hilma Hadiksuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Cet.2; Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 53.

Adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan juga sebuah gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan hingga kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat.⁷ Hukum adat adalah hukum yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang tidak tertulis berdasarkan adat.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah wujud dari gagasan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.⁹

Adat secara umum dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Pada ensiklopedi Islam diuraikan bahwa adat mempunyai arti “kebiasaan” atau “tradisi” pada masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” di sini lazimnya dipakai dengan tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.¹⁰

Kata tradisi biasa merujuk pada kata adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab *adah* yang berarti kebiasaan yang dianggap bersinonim dengan Urf. Sesuatu yang dikenal atau yang diterima secara umum. Adat umumnya mengacu pada konvensi yang sudah lama ada, baik yang sengaja diambil atau akibat dari

⁷Sudarsono. *Kamus Hukum*, (Cet.5; Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), h. 15.

⁸Sudarsono. *Kamus Hukum*, h. 168.

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. I* (Cet.1; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 6.

¹⁰*Ensiklopedi Islam, Jilid I* (Cet.3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 21.

penyusaian tidak sengaja terhadap keadaan, yang dipatuhi dan meninggalkan perbuatan/amalan.¹¹

Tradisi dalam bahasa inggris *tradition* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tradisi. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata tradisi diartikan segala sesuatu, seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang.¹² Yang masih dijalankan dalam masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan sesuatu yang paling benar dan terbaik¹³

Tradisi atau traditional. Kata ini berasal dari bahasa latin trader yaitu menyampaikan, mengantarkan, mewariskan dan menyalurkan. Tradisi adalah sebuah proses yang berulang tentang sesuatu yang disampaikan, diwariskan dari masa lalu dan masa berlaku hingga masa sekarang. Proses itu dijalankan, diwariskan dan ditransmisikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tradisi sifatnya bertahan karena senantiasa dilestarikan dari waktu ke waktu.¹⁴

Hukum tradisi adalah hukum yang tidak dapat di ubah. Hukum diangankan sebagai “*adat istiadat*” leluhur yang pertama kali lahir kedunia, sahala leluhur.¹⁵ Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta “Budhayah” yakni bentuk jamak dari budhi yang berarti budi dan akal. Jadi kebudayaan adalah hasil budi atau akal manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup.

¹¹Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 166.

¹²H. Abuddin Nata *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001), h. 139-140

¹³Sudarsono. *Kamus Hukum*, h. 505.

¹⁴Ahmad Taufik Hidayat. *Tradisi Intelektual Islam Minangkabau* (Cet.I; Kementrian Agama RI, 2011), h. 31-32.

¹⁵J. C. Vergouwen. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Cet.I; Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2004), h. 116.

E.B Taylor dalam bukunya “*primitive Culture*” merumuskan definisi secara sistematis dan ilmiah tentang kebudayaan sebagai berikut: Kebudayaan adalah kompilasi (jalinan) dalam keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keagamaan, hukum, adat istiadat serta lain-lain kenyataan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat.¹⁶

Tradisi dan kebudayaan dalam pandangan pakar hukum positif adalah kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam satu sisi kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya keadaan yang diyakini secara umum dan harus di hormati sebagai undang-undang. Dalam pandangan pakar hukum Islam, adat adalah apa yang boleh dilakukan oleh mayoritas umat manusia, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, secara berulang-ulang, sehingga meresap dalam jiwa dan diterima dalam akal pikiran mereka. Atau apa yang telah dikenal manusia dan mereka lakukan atau tinggalkan tentang ucapan atau perbuatan.

Bagi Hasan Hanafi tradisi merupakan *starting point* sebagai tanggungjawab peradaban. Tradisi menurut Hanafi dapat ditemukan dalam berbagai level. Pertama, tradisi itu bisa kita temukan dalam berbagai bentuk tulisan: buku, manuskrip, atau lain-lainnya, yang tersimpan di berbagai perpustakaan atau tempat-tempat lain. Kedua, tradisi bisa juga berupa konsep, pemikiran, dan ide-ide yang masih hidup dan hadir di tengah realitas. Setiap tradisi mengusung semangat zamannya, mencerminkan tahap perjalanan sejarah.¹⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan dan ajaran yang turun temurun dari nenek moyang yang

¹⁶Abu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 50.

¹⁷M. Faisol. ” *Mengubah Dunia Melalui Tradisi* (Membaya proyek peradaban Hasan Hanafi),” *Religion And Science*, Vol.2, No. 1 (Juli, 2006,), h. 101.

dijalankan oleh masyarakat.¹⁸ Dengan kata lain bahwa tradisi merupakan warisan masalalu yang dilestarikan terus-menerus hingga sekarang. Warisan masalalu ini bisa berupa nilai, norma sosial, perilaku manusia dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Istilah tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, wujudnya masih ada hingga sekarang.

C. *Adat dalam Hukum Islam*

1. Pengertian ‘Urf

Kata adat berasal dari bahasa Arab (عادة) akar katanya: āda, ya’udu mengandung arti (pengulangan). Karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Adapun secara istilah ada beberapa pengertian adat yaitu:

ما استمر الناس فيه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى

Sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus menerus atau

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.¹⁹

Adat dalam bahasa arab (ādah)’ sinonim dengan kata ‘urf. Secara literal, kata *ādah* berarti kebiasaan, adat atau praktek, sementara arti kata ‘urf sesuatu yang tidak di kenal. Beberapa ahli membedakan antara kedua kata tersebut. Mereka berpendapat bahwa *ādah* mengandung arti “pengulangan atau praktek

¹⁸Bambang Marhiyanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Media Centre, Tth), h. 627.

¹⁹Totok Jumanoro dan Samsul Munawir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet.I; Jakarta: AMZAH, 2005), h. 1.

yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individu (*ādah fardiyyah*) maupun kelompok (*ādah jamāiyyah*).²⁰

‘Urf secara etimologi berasal dari kata ‘arafa - yu’rifu(عرف -) sering diartikan dengan *al-ma’ruf* (المروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal” atau berarti yang baik atau sesuatu yang dipandang baik. Dalam kitab lisan al-Arab ‘urf ialah الرائحة الطيبة suatu bau yang harum maksudnya adalah perbuatan yang menghasilkan kebaikan.

Didalam kitab Mu’jam al-Wasit الرائحة مطلقاً وأكثر ما يشتغل في الطيبة منها yang maksudnya ialah sesuatu yang terkumpul di dalamnya suatu kebaikan²¹. ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang masyarakat yang merupakan kebiasaan dikalangan mereka.²²

‘Urf secara terminology yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى المعادة. وفي لسان الشرعيين لافرق بين العرف والعادة

‘Urf artinya ialah apa-apa yang salin diketahui oleh manusia dan mereka mempraktekannya baik perkataan, perbuatan atau meninggalkan²³sesuatu. Dan ini juga dinamakan Adat dan dikalangan ‘Ulama syari’at tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat.²⁴

‘Urf atau adat kebiasaan yaitu suatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.

²⁰Ratno Lukito. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), h. 5.

²¹Totok Jumanoro dan Samsul Munawir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. h. 333.

²²Misbahuddin. *Ushul Fiqh* (Cet.I; Makassar: ISBN, 2013), h. 142.

²³H. Sidi Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1993), h. 236.

²⁴Misbahuddin. *Ushul Fiqh II* (Cet.I; Makassar: ISBN. 2015), h. 198.

Sebagian ulama ushul fiqh, '*urf*' disebut juga adat sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat. Namun demikian, dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf*' lebih umum daripada pengertian adat, karena adat selain telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan merupakan hukum tertulis sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.

Dilihat sepintas seakan-akan ada kesamaan antara '*ijma*' dengan '*urf*' karena keduanya sama-sama ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada '*ijma*' ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Oleh karena itu, para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedangkan pada '*urf*' bahwa telah terjadi peristiwa atau kejadian kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya dan ini dianggap juga mengerjakannya dan menjadi terbiasa mengerjakannya di antara mereka. Pada '*ijma*' masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya sedangkan pada '*urf*' masyarakat mengerjakannya karena mereka telah terbiasa mengerjakannya dan memandang apa yang dikerjakan itu bernilai baik.

Berdasarkan hasil seleksi tentang '*urf*', maka '*urf*' dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. **Pertama**, '*urf*' yang lama secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan, tidak ada unsur mudharatnya. *Urf* dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum islam.
- b. **Kedua**, '*urf*' lama yang pada prinsipnya mengandung unsur maslahat tidak ada unsur mafsadat tetapi dalam pelaksanaannya tidak disambut baik oleh islam.

Urf dalam bentuk ini dapat diterima dalam islam tetapi dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan penyesuaian.

- c. **Ketiga**, '*urf*' yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak), maksudnya yang dikandungnya hanya unsur merusak dan tidak mengandung unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur merusaknya lebih besar. *Urf* dalam bentuk ini ditolak oleh islam secara mutlak.
- d. **Keempat**, '*urf*' yang telah berlangsung lama diterima oleh banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, tetapi secara jelas belum trserap kedalam *syara'*, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bagi kalangan para ahl hukum islam yang mengakuinya mempergunakan kaidah '*al 'adatu muhakkamtun*' (adat dapat dijadikan sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan *syara'*).

Dalam literature yan membahas kehujahan '*urf*' sebagai sumber hukum dapat diketahui bahwa '*urf*' itu telah diamalkan oleh semua para ahli hukum islam terutama dikalangan mazhab Hanafiah dan Malikiyah. Ulama Hanafiah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan ini adalah istihsan *al-'urf* (istihsan yang menyandarkan pada '*urf*') ulama Malikiyah juga mempergunakan '*urf*' sebagai sumber hukum terutama '*urf*' (tradisi) yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis *ahad*. Ulama Syafi'yah banyak menggunakan '*urf*' dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuannya dalam *syara'*. Imam Syafi'I menggunakan '*urf*' sebagai sumber hukum atas dasar pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan

bila tidak menggunakan *'urf* sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan berbagai masalah social yang timbul dalam masyarakat.²⁵

Dari segi bahasa arti *'urf* ialah mengetahui, kemudin dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, aianggap baik dan diterima oleh fikiran yang sehat. Kata-kata *'urf* pada firman Tuhan berikut ini diartikan dalam arti tersebut yaitu: *wa'mur bil-'urfi wa a'ridl 'anil- jahilin* (suruhlah perkara yang baik dan jauhi orang-orang yang congkak).

Dalam istilah fuqaha *'urf* ialah kebiasaan kebanyakan orang dalam kata-kata dan perbuatannya (*'adatu jumhuri- qaumin fi qaulin aw'amalin*). Dari pengertian ini kita mengetahui bahwa *'urf* dalam sesuatu perkara tidak bisa terwujud kecuali apa bila *'urf* itu mesti berlaku untuk sering-seringnya berlaku pada perkara tersebut, sehingga masyarakat yang mempunyai *'urf* tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi unsur pembentukan *'urf* ialah pembiasaan bersama antara orang banyak dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus-menerus atau sering-seringnya dan kalau tidak demikian maka disebut perbuatan perseorangan.²⁶

'Urf juga dibentuk dengan adat. Menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. Menurut para ahli

الْعَادَةُ شَرْعٌ مُّحَكَّمَةٌ

Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum dan

الْمَعْرُوفُ فَأَكَا لَمْشَرُ طِ شَرْطًا. وَالشَّائِبُ بَا لْعُرْفِ كَا لَشَا بَتِ بَا لَنْصِ

²⁵H. Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 90-94.

²⁶Ahmad Haanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h. 89.

Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat dan sesuatu yang tetap berdasarkan ‘urf adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan nash.²⁷

Kaidah fikih asasi kelima adalah tentang adat atau kebiasaan. Dalam bahasa arab, terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-‘adat* dan *al-‘urf*. Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, al-Jurjani, dan ‘Ali Haidar berpendapat bahwa *al-‘adat* semakna dengan *al-‘urf*. Menurut mereka, adat dan *al-‘urf* adalah semakna (العرف عمى العادة متردفاً) dengan tidak menyebutkan namanya, ‘Abd al-Aziz al-Khayyath menjelaskan bahwa diantara ulama ada yang membedakan antara *al-‘adat* dan *al-‘urf* diantara perbedaannya adalah bahwa *al-‘adat* lebih umum dari *al-‘urf*, karena *al-‘adat* adalah kebiasaan, baik secara individu maupun secara kolektif, sedangkan *al-‘urf* adalah kebiasaan kolektif saja. Oleh karena itu, ‘Abd al-‘Aziz al-Khayyath mengutip kaidah sebagai berikut:

كل عرف عادة وليست كل عادة عرفاً

(Setiap ‘urf adalah ‘adat dan setiap ‘adat adalah ‘urf).

Dalam ilmu ushul al-fiqh, *al-‘urf* dibedakan menjadi dua: *al-‘urf* yang baik (*al-‘urf al-shabib*) dan *al-‘urf* yang rusak (*al-‘urf al-fasid*). *Al-‘urf* yang baik dapat dipertimbangkan dalam *istinbath* hukum dan sebaliknya *al-‘urf* yang fasid tidak boleh dijadikan bahan pertimbangan dalam *istinbath* hukum.

‘Ali Haidar dalam *Syarh Majallat al-Ahkam al-‘Adliyyat* mengatakan bahwa *al-‘urf* adalah

الأمر الذي يتقرب في النفوس ويكون مقبولا عند الطباع السليمة بتكراره بتكراره بعد المرة

²⁷Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet.I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 123-125.

“Sesuatu yang pelakunya merasa tenang ketika melakukannya dan diterima berdasarkan akal sehat serta dijadikan secara berulang-ulang.”

Kaidah fikih asasi yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan adalah

العادة حكمة

“Adat (dapat dijadikan pertimbangan) dalam penetapan hukum.”²⁸

Adat yang fasid haram hukumnya untuk dipelihara bahkan al-Qur'an sangat mencegah mereka yang hanya ikut-ikutan kepada adat tanpa alasan yang jelas. Diperjelasnya dalam Q.S. al-Mā'idah/5:104 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
ءَابَاءَنَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْيَاسِرُونَ ۖ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

“Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk”.²⁹

Dalam Qaidah Fiqhiyah, qaidah ketiga ialah الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ adat dapat dijadikan hukum. Menurut Mushlih Usman, kaidah tersebut didasarkan kepada nash Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raaf/7: 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

²⁸Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh* (Cet.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 153.

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 108.

Kemudian Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4:19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah). Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ada perbedaan antara *al'adah* dengan *'urf*. Adat (*al-adah*) merupakan perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia yang keberanarannya logis, tetapi tidak semuanya dapat dijadikan hukum. Sedangkan *'urf* jika mengacu pada kata *ma'ruf* berarti kebiasaan yang normative dan semuanya dapat dijadikan

hukum sebab tidak ada yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau As-Sunnah, sesuai dengan akal sehat.

Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan adat diantaranya adalah kaidah:

كُلُّ مُؤَرِّدٍ الشَّرِّ مُطْلَقٌ وَلَا ضَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فَيُّ اللَّغَيْرِ خُغٌ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya:

“Semua yang diatur syara’ secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, semua itu dikembalikan kepada ‘urf.”³⁰

Dalam Qaidah-qaidah Kulliyah ada 5 (lima) kaidah salah satunya ialah العادة حكمة.

Qaidah ini dirumuskan berdasarkan Firman Allah:

فَاخَذْتُمْ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيمِينَ

Terjemahnya:

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh”. (QS.al-A’raaf/7:91).

Hadist Mauquf:

فمراه المسامون حسنا فهو عندا لله حسن

Artinya:

Apa yang dipandang oleh orang Islam adalah baik, maka baik pula di sisi Allah”. (H.R. Ahmad).³¹

Adat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan sesuatu hukum, bahkan didalam system hukum islam kita kenal *qa'idah kulliyah fiqhiyyah* yang berbunyi:

العادة سرعة حكمة, العادة حكمة

Maksudnya, adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan sesuatu hukum syara atau kaidah lain:

³⁰Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet.I; Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2009), h. 221-222.

³¹Misbahuddin. *Ushul Fiqh II*. h. 197.

الثا بالعرف كالثابت بدليل شرعي

“Sesuatu yang ditetapkan ‘adat/’urf seperti yang ditetapkan dengan dalil syara’.”

Didalam *istishan* telah kita kenal macam-macam *istishan* ditinjau dari segi dan diantaranya adalah *istishan* yang sanadnya, ‘urf seperti memesan barang yang belum jadi (memesan pakaian kepada tukang jahit). Secara terminologis ‘urf/’adat/ta’ammul mengacu kepada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya baik perbuatan ataupun perkataan.³²

2. Macam-macam ‘Urf

a. Dari segi objek:

- 1) ‘Urf *al-lafzi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
- 2) ‘Urf *al-amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupan:

- 1) ‘Urf *al-‘am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
- 2) ‘Urf *al-khasas*, yaitu kebiasaan yang berlaku didaerah atau masyarakat tertentu.

³²H.A Djazuli dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 185.

c. Dari segi keabsahan:

- 1) '*Urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak pula menadatkan kemudharatan.
- 2) '*Urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*'.

3. Kehujjahan '*Urf*

a. Ulama sepakat mengatakan bahwa '*Urf shahih* yang menyangkut '*urf al-'am* dan '*urf al-khasas* serta '*urg al-amalia* dapa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara*'. '*Urf* juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.

b. Diantara ucapan yang mansyur dikalangan ulama:

العروف عركا لمشروط شرطاً والشابيت بالعرف كالشبابا لنص

“Apa yang terkenal sebagai '*Urf* sama dengan yang ditetapkan sebagai syarat dan sesuatu yang tetap karena '*urf* sama dengan yang ditetapkan karena *nash*”.

4. Syarat-syarat '*Urf*

- a. '*Urf* itu berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. '*Urf* telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya '*urf* itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan.

Kalau terjadi pertentangan '*urf*' dengan dalil syara' ditengah-tengah masyarakat:

- a. Pertentangan '*urf*' dengan nash yang bersifat khusus atau rinci, maka '*urf*' tidak dapat diterima.
- b. Pertentangan '*urf*' dengan nash yang bersifat khusus, maka '*urf*' harus dibedakan antara '*urf al-lafzi*' dengan '*urf al-amalia*'. Jika '*urf*' itu '*urf al-lafzi*', maka dapat diterima dengan alasan tidak ada indicator bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh '*urf*'.
- c. '*Urf*' yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan '*urf*' tersebut, maka ulama sepakat mengatakan bahwa '*urf*' seperti ini baik *lafzi* maupun *amalia* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum syara'.³³

5. Kedudukan '*Urf*' sebagai Sumber Hukum

Dalam kehidupan social dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka '*urf*' lah (kebiasaan) yang menjadi undang-undang yang mengatur mereka. Jadi sejak zaman dahulu '*urf*' mempunyai fungsi sebagai hakim dalam kehidupan manusia.

Oleh karena diantara '*urf*' ada yang baik dan ada pula yang buruk, maka pengukuhan '*urf*' yang baik dan penghapusan '*urf*' yang buruk menjadi salah satu tujuan utama kedatangan Syari'at-syari'at (agama-agama) islam.

Dalam pandangan sarjana-sarjana hukum positif sendiri sampai sekarang, '*urf*' dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, dimana unsur-unsurnya

³³H. Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. h. 237.

banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang.

Syari'at Islam datang kemudian banyak mengakui tindakan dan hak yang sama-sama dikenal oleh syari'at Islam dan masyarakat Arab sebelumnya, disamping banyak memperbaiki dan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Selain itu syari'at juga membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan manusia satu sama lain dalam kehidupan sosialnya atas dasar keperluan dan bimbingan kepada penyelesaian yang sebaik-baiknya kerana syari'at-syari'at Tuhan dengan aturan keperdataannya (segi keduniaannya) dimaksudkan untuk mengatur kepentingan dan hak-hak manusia. Oleh karena itu kebiasaan yang telah ada bisa diakui asal dapat mewujudkan tujuan-tujuannya serta sesuai dengan dasar-dasarnya yang umum.

Dalam syari'at Islam dalil yang dijadikan dasar untuk menganggap '*urf*' (kebiasaan) sebagai sumber hukum ialah dalam QS. Al-A'raaf/7:199.

Meskipun kata-kata '*urf*' disini sebenarnya diartikan menurut arti-bahasa yaitu perkara yang biasa dikenal dan dianggap baik, namun bisa juga dipakai untuk menguatkan '*urf*' menurut arti istilah (terminologi hukum Islam), karena apa yang biasa dikenal oleh orang banyak dalam perbuatan-perbuatan dan hubungannya satu sama lain termasuk perkara yang dianggap baik oleh mereka dan dikenali oleh fikiran mereka.

Para Fuqaha menambahkan dalil lain sebagai dasar pemakaian '*urf*' yaitu hadist: *Ma raahul-muslimuna hasanan fahuwa 'in-dallahi hasanun'*. (apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam maka bagi Tuhan juga baik) Hadist mauquf dari Ibnu Abbas r.a.

Hukum-hukum yang diterapkan berdasarkan '*urf*' dapat berubah menurut perubahan '*urf*'-nya, karena apabila pokok berubah maka cabang juga berubah.

Sebenarnya apabila diteliti lebih lanjut maka ‘urf tidak merupakan dalil yang berdiri sendiri sebab pada dasarnya adala memperhatikan Maslahat musralah.³⁴

6. Alasan Adat dapat Dijadikan Dalil

a. Hadist Nabi yang berbunyi:

مَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam maka hal itu baik pula di sisi Allah.”

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi maka akan menimbulkan kesulitan.

Dalam kaitan ini, Allah berfirman:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong”. (Al-Hajj/22:78).

Imam al-Sarkhasy dari Madzhab Hanafiy didalam kitabnya al-Masbuth, menyebutkan:

الشَّيْءُ بَيِّنٌ بِأَعْرَافٍ كَالشَّيْءِ بَيِّنٌ بِالنَّصِ

“Sesungguhnya yang ditetapkan ‘urf seperti yang diterapkan dalil nash.”

³⁴Ahmad Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. h. 89-90.

Maksudnya barangkali ialah bahwa segala yang ditetapkan oleh ‘*adat*’ kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa nash didalam masalah-masalah yang tidak terdapat nash untuk penyelesaiannya.

- b. Hukum Islam didalam *khitab*-nya memelihara hukum-hukum arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki menghormati tamu dan sebagainya.
- c. ‘*Adat*’ kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata maupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.

7. Perlawanan ‘*Urf*’ dengan Dalil-Dalil Syara’

Kebiasaan orang banyak atau perhubungannya sama lain kadang-kadang melampaui batas-batas pokok yang telah dibuat oleh Syari’at atau berlawanan dengan nas-nasnya. Dalam hal ini harus dibedakan, apakah nash-nash tersebut bersifat khusus atau umum.

Nash khusus, jika suatu perkara sudah di ‘urf-kan (diadatkan) orang sedan dari Syara’ ada nash khusus yang melarangnya maka untuk perkara itu kebiasaan tersebut tidak dipakai baik ‘urf bersifat khusus atau bersifat umum, baik terjadi sesudah turunnya nash atau pada waktu turunnya. Seperti kebiasaan masyarakat Jahili untuk mengangkat anak (attabanni) dan diberinya kedudukan sebagai anak kandung hal ini bagi seseorang faqih hanya ada satu pilihan yaitu apakah mengesampingkan nash-nash dari syara’ dan hal ini tidak bisa terjadi kecuali dalam keadaan luar biasa dan tertentu pula, sedang ‘urf tidak termasuk didalamnya atau akan mengesampingkan ‘urf dan inilah yang harus dipakai sebab aturan-aturan dari

Syara' bersifat mengikat (ilzam) tidak diundangkan (disyari'atkan) kecuali untuk dilaksanakan dan dihormati.

Diantara 'urf-'urf (kebiasaan-kebiasaan) ada 'urf yang baik dan ada 'urf yang buruk dan diantara tujuan Syari'at ialah menampung 'urf yang baik disamping menghapuskan 'urf yang buruk dan mengarahkan manusia kepada kebaikan umum. Dalam hal ini yang menjadi pedoman baik atau buruk ialah perintah atau larangan syara' karena perintah dan larangan tersebut tentu didasarkan atas tujuannya yang teliti dan menyeluruh terhadap berbagai seginya serta akibat-akibatnya. Jadi apa yang dilarang oleh syara' secara khusus harus dianggap sebagai perkara yang bisa membawa kerugian bagi masyarakat meskipun menguntungkan bagi golongan atau beberapa orang tertentu.

Diantara undang-undang (ketentuan) yang ditetapkan oleh penguasa dalam sesuatu negara ada yang termasuk dalam aturan umum dan bersifat memaksa (*dwin gende recht*) sehingga seseorang tidak boleh mengadakan sesuatu persetujuan atau kebiasaan yang berlawanan dengan aturan umum tersebut, dan persetujuan atau kebiasaan yang demikian keadaannya dianggap batal, seperti ketentuan-ketentuan tentang sewa menyewa, perburuan dan sebagainya yang harus ditunduki oleh seseorang ketika mengadakan perjanjian sewa menyewa atau kontrak kerja dan sebagainya.

Oleh karena itu syari'at Islam banyak membawa larangan terhadap tindakan-tindakan atau perikatan keperdataan yang dibiasakan pada masa Jahili, seperti serangan terhadap tetangga kabilah dan merampas harta bendanya dan sebagai gantinya syari'at Islam membangun suatu negara akhlak dan negara hukum dimana semuanya harus tunduk kepadanya.

Nash umum, apabila 'urf-'urf berlawanan dengan ketentuan (nash) hukum yang umum dimana keumuman nash tersebut mencakup perkara yang di 'urfkan

maka kedudukan ‘urf tersebut tidak selalu sama, sebab hal ini tergantung kepada persoalan-persoalan apakah ‘urf tersebut telah terjadi pada waktu keluarnya nash tersebut ataukah ‘urf tersebut baru terjadi sesudah keluarnya nash tersebut.

‘*Urf* yang telah terjadi pada waktu keluarnya nash adakalanya berupa ‘*urf* kata-kata atau ‘*urf* perbuatan.

Kalau berupa ‘urf kata-kata maka sudah disepakati oleh para fuqaha bahwa ‘urf tersebut bisa dipakai. ‘*Urf* kata-kata yang umum adalah yang dipakai dalam pembicaraan. ‘*Urf* kata-kata seperti jual beli, shalat, puasa, haji, iddah isteri yang terdapat ketika turunnya nash tersebut meskipun arti ‘urfnya yang terdapat berbeda dengan arti semula menurut bahasa.

Kalau ‘*urf* yang telah terjadi ketika keluarnya nash berupa ‘*urf* perbuatan maka pendirian fuqaha tidak sama. Menurut ulama-ulama mazhab Hanafi harus diadakan pemisahan apakah ‘urf tersebut bersifat umum atau khusus.

Kalau bersifat umum maka ‘urf umum tersebut bisa dibatasi nash (ketentuan) dari Syara’. Lingkungan berlakunya nash tersebut dibataskan karena selain yang di ‘*urfkan* sebab adanya ‘urf tersebut menjadi tanda bahwa apa yang dikehendaki oleh syara’ dengan nash yang dikeluarkan tidak sampai mencakup perkara yang di’*urfkan* tersebut.

Alasan fiqh dalam hal ini mengatakan bahwa pemakaian ‘urf disini tidak berarti membatalkan nash yang umum tersebut sebab nash ini tetap dipakai untuk perkara-perkara dan hal ini berarti memakai nash dan ‘urf bersama-sama. ‘Urf perbuatan tersebut menunjukkan keperluan orang banyak terhadap perbuatan tersebut dan apabila dihapuskan maka akan menimbulkan kesulitan bagi mereka.

Contoh ‘*urf* perbuatan yang bersifat umum dan yang dapat mebatasi nash ialah pemesanan barang-barang (istishna). Hadist Nabi s.a.w sebagai nash yang

umum disebutkan sebagai berikut: “Nabi saw melarang menjual apa yang tidak ada ditangan seseorang”.

Apabila ‘urf perbuatan bersifat khusus artinya berlaku untuk sesuatu tempat atau sesuatu golongan tertentu maka menurut ulama-ulama mazhab Hanafi tidak bisa membatasi meskipun sudah terdapat pada waktu turunnya nash karena tidak menyeluruhnya ‘urf tersebut maka tidak cukup memberikan kekuatan yang bisa membatasi ke umum nash tersebut.

Apabila sesuatu ‘urf terjadi sesudah turunnya nash meskipun nash yang bersifat umum maka tidak bisa membatasi ke umuman sesuatu nash sebab ‘urf yang demikian itu datang setelah ada ketentuan tentang batas-batas pengertian nash dari Syara’ kalau ‘urf yang timbul kemudian itu dipakai, tentunya akan terjadi perubahan-perubahan pada ketentuan hukum syara’ dengan berubah-ubahnya ‘urf yang datang kemudian dan hal ini berarti membuang syara’. Baik berupa ‘urf kata-kata maupun ‘urf perbuatan, kedua-duanya tidak bisa dipakai bahkan ‘urf kata-kata lebih-lebih lagi tidak bisa dipakai.³⁵

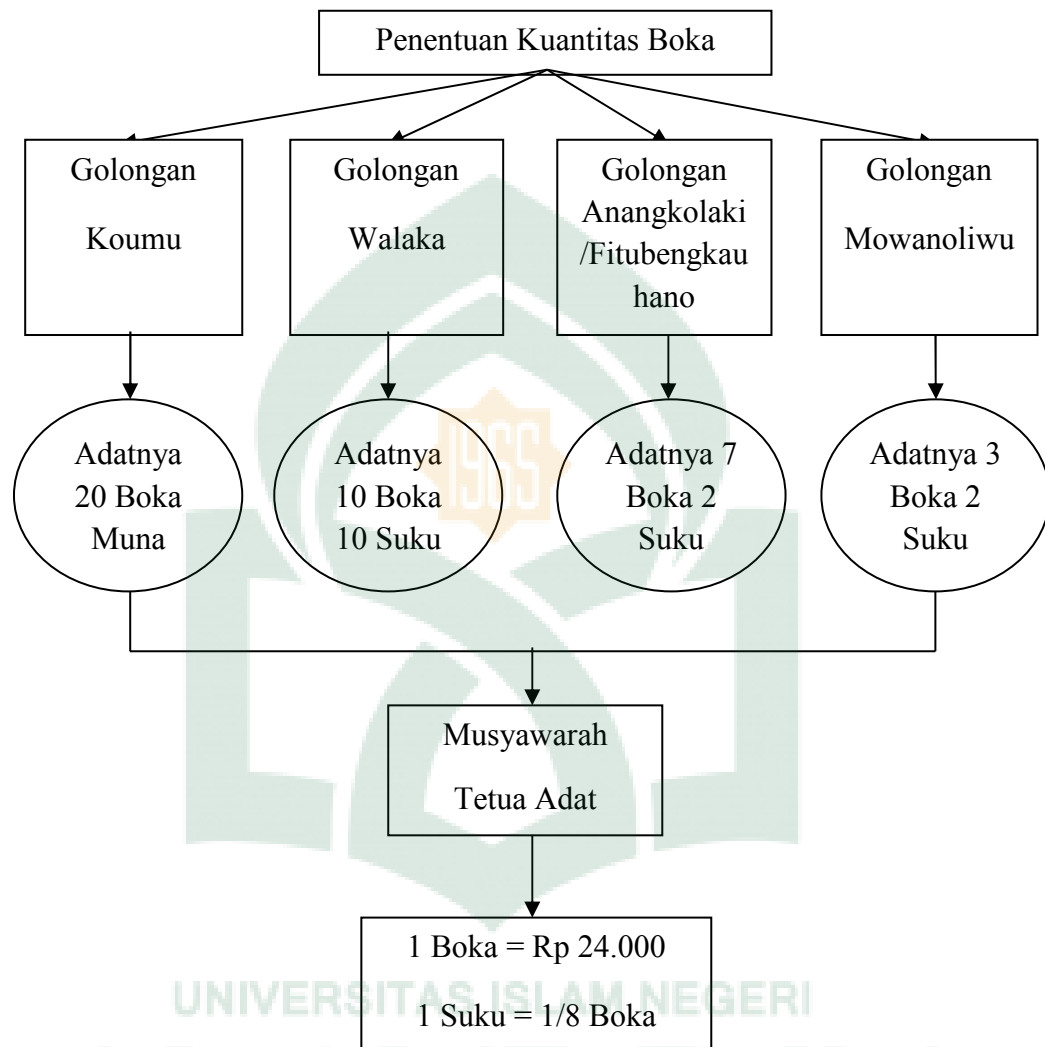
8. Syarat Penggunaan Adat Kebiasaan

Adat digunakan dengan syarat-syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur’an maupun al-Sunnah.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
- c. Tidak berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang islam saja.
- d. Tidak berlaku didalam masalah *ibadah mahdlah*.

³⁵Ahmad Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. h. 97-100.

D. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research kualitatif deskriptif* dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait dalam proses penentuan kuantitas boka adat perkawinan suku Muna.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara karena keterkaitan dengan judul yang diajukan oleh peneliti. Selain itu, Kabupaten Muna merupakan tanah kelahiran yang dapat memudahkan peneliti dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif* dan *Yuridis*. *Pendekatan Normatif*, yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan penentuan kuantitas boka adat perkawinan dalam perspektif hukum Islam. *Pendekatan Yuridis* berupa perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara seperti interview, yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti buku-buku, literature-literatur hukum, internet, hasil penelitian yang berwujud laporan. Serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung yang ditempuh dengan dua cara, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*), *interview* adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan dengan tulisan yang terstruktur, untuk dijawab. *Interview* ini untuk memperoleh data dan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Dalam hal ini wawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penentuan kuantitas boka adat perkawinan suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Dokumentasi, yaitu untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah dokumen melalui teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data dengan membaca dan mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan dokumen tentang perkara penentuan kuantitas boka.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diuji validasi”. Uji validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkap kenapa yang ingin diungkapkan.

Penelitian kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen non test, yang berupa:

1. Interview

Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari narasumber.

2. Observasi

Dalam hal ini pengamatan langsung, baik berupa rekaman gambar dan rekaman suara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat umum. Data yang diperoleh dari interview dan bahan-bahan yang dibutuhkan tentang prosedur penentuan boka dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan secara induktif untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskripsi ini meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

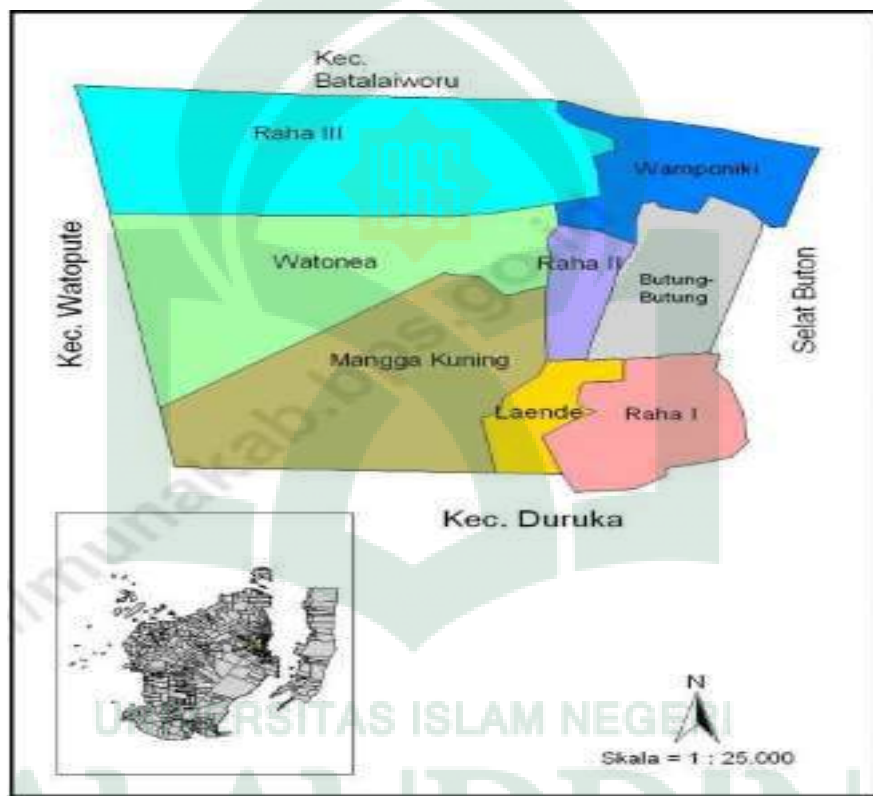
BAB IV

PROSES PENENTUAN KUANTITAS *BOKA* ADAT PERKAWINAN SUKU MUNA DI KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA

A. *Gambaran Umum Kecamatan Katobu*

1. Letak Geografis

PETA WILAYAH KECAMATAN KATOBU



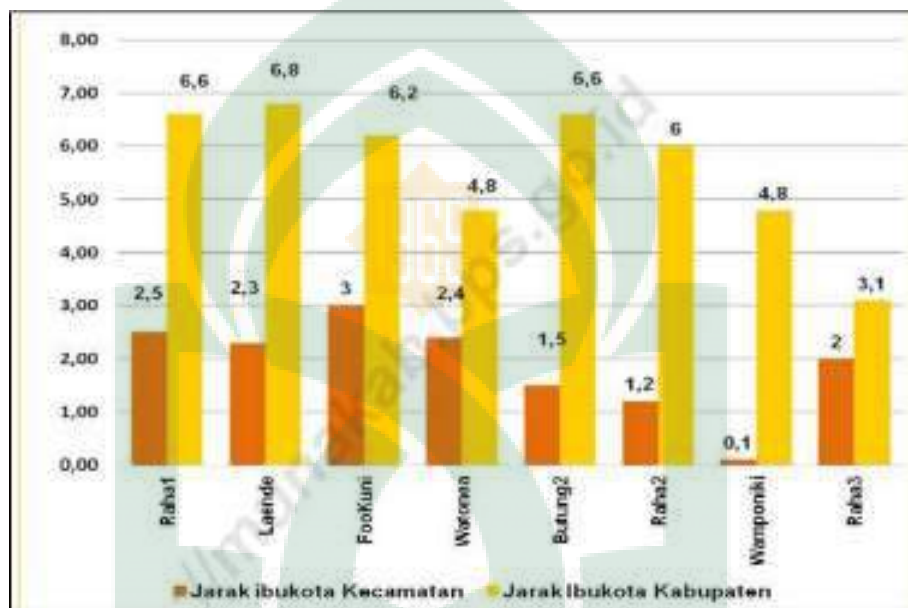
Secara astronomis, Kecamatan Katobu terletak di bagian Selatan Pulau Muna. Secara geografis, Katobu terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 4.49° - 4.50° Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 122.42° - 122.43° Bujur Timur. Batas wilayah administrasi Kecamatan Katobu sebagai berikut:¹

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batalaiworu.

¹Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna. *Kecamatan Katobu Dalam Angka 2017*. (Cet. 2; Raha: BPS Kabupaten Muna, 2017), h. 2.

- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Duruka.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kontunaga.

**Jarak Kantor Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten
Menurut Desa/Kelurahan**



Secara administratif, Kecamatan Katobu terdiri dari 8 kelurahan. Dari jumlah kelurahan yang ada, yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Watonea dengan luas 5,68 Km² (44,10 %), sedangkan Kelurahan yang memiliki Wilayah terkecil adalah Kelurahan Wamponiki dengan luas 0,55 Km² (4,27 %) dari luas Kecamatan Katobu.

Luas Wilayah Kecamatan Katobu Menurut Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1. Raha I	1, 30	10, 09
2. Laende	1, 25	9, 70
3. Foo Kuni	2, 27	17, 62

4. Watonea	5, 68	44, 10
5. Butung-Butung	0, 56	4, 35
6. Raha II	0, 56	4, 35
7. Wamponiki	0, 55	4, 27
8. Raha III	0, 71	5, 51
KATOBU	12, 88 km ²	100, 00%

Batas Wilayah Kecamatan Katobu Menurut Desa/Kelurahan

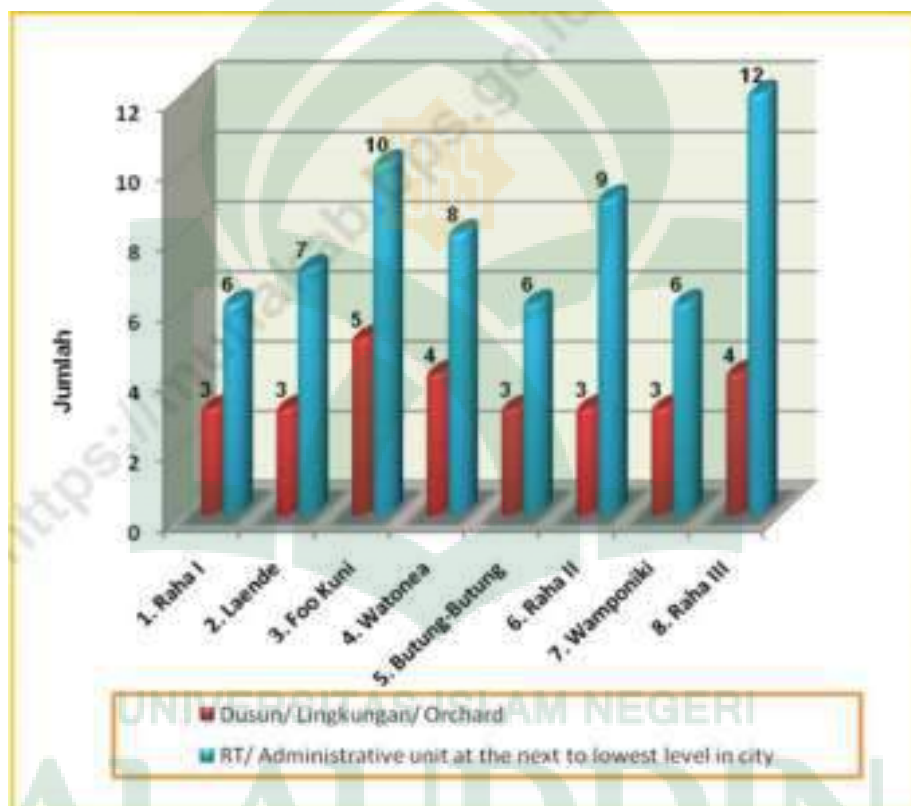
Desa/Kelurahan	Batas			
	Utara	Timur	Selatan	Barat
1. Raha I	Butung-Butung	Laende	Kecamatan Duruka	Selat Buton
2. Laende	Raha II	Foo Kuni	Kecamatan Duruka	Raha I
3. Foo Kuni	Watonea	Raha II dan Laende	Kecamatan Duruka	Kecamatan Watopute
4. Watonea	Raha III	Kecamatan Watopute	Foo Kuni	Raha II
5. Butung-Butung	Wamponiki	Watonea dan Foo Kuni	Laende	Butung-Butung
6. Raha II	Wamponiki	Raha II	Raha I	Selat Buton
7. Wamponiki	Kecamatan Batalaiworu	Raha III	Butung-Butung	Selat Buton
8. Raha III	Kecamatan Batalaiworu	Kecamatan Watopute	Watonea	Wamponiki
KATOBU	Kecamatan	Selat Buton	Kecamatan	Kecamatan

	Batalaiworu		Duruka	Kontunaga
--	-------------	--	--------	-----------

2. Sistem Pemerintahan

Secara administratif, Kecamatan Katobu terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, 28 (dua puluh delapan) Lingkungan, dan 64 (enam puluh empat) Rukun Tetangga.²

Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Desa/Kelurahan



Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan	Ibu Kota Desa/Kelurahan	Dusun/Lingkungan	Rukun Tetangga
1. Raha I	Raha I	3	6
2. Laende	Laende	3	7

²Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna. *Kecamatan Katobu Dalam Angka 2017*, h. 19.

3. Foo Kuni	Foo Kuni	5	10
4. Watonea	Watonea	4	8
5. Butung- Butung	Butung-Butung	3	6
6. Raha II	Raha II	3	9
7. Wamponiki	Wamponiki	3	6
8. Raha III	Raha III	4	12
Jumlah/Total		28	64

3. Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Katobu telah mencapai 31.077 pada tahun 2016 jiwa yang terdiri dari 14.842 jiwa laki-laki dan 16.235 jiwa perempuan. Berdasarkan sebaran penduduknya, sekitar 18,33 persen penduduk menempati kelurahan Raha II. Sebaran penduduk paling rendah berada di Kelurahan butung-butung sebesar 8,07 persen.³

Kecamatan Katobu memiliki luas wilayah sebesar 12,88 Km² dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata. Kelurahan Watonea merupakan kelurahan yang memiliki wilayah terluas yaitu 5,68 Km² (44,10 %) dengan kepadatan penduduk yang cukup kecil yaitu 640 jiwa/Km². sedangkan Kelurahan yang memiliki luas terkecil adalah Kelurahan Wamponiki yaitu 0,55 Km² (4,27 %) dengan kepadatan penduduk yang terbesar kedua dari Kelurahan Raha II yaitu 8.069 jiwa/Km².

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau ratio jenis kelamin penduduk Kecamatan Katobu sebesar 92 yang berarti pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 92 orang penduduk laki-laki. Namun tidak

³Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna. *Kecamatan Katobu Dalam Angka 2017*, h. 29.

semua Kelurahan di Kec. Katobu menunjukkan rasio jenis kelamin lebih kecil dari 100. Kelurahan Laende mempunyai rasio jenis kelamin sebesar 104 yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Sebaliknya di Kelurahan Jika dilihat dari komposisi umurnya, penduduk Kec. Katobu juga mengikuti piramida. Semakin kebawah, semakin banyak pula jumlah penduduknya. Namun proporsi penduduk paling banyak berada pada usia 15-19 tahun. Pada usia ini jumlah laki-laki mencapai 1705 jiwa, sedangkan perempuan mencapai 1973 jiwa.

Kepadatan Penduduk Kecamatan Katobu Menurut Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km²)	Penduduk	Kepadatan
1. Raha I	1, 30	2.808	2.160, 0
2. Laende	1, 25	3.436	2.748, 8
3. Foo Kuni	2, 27	3.227	1.421, 6
4. Watonea	5, 68	3.639	640, 7
5. Butung-Butung	0, 56	2.510	4.482, 1
6. Raha II	0, 56	5.698	10.175, 0
7. Wamponiki	0, 55	4.660	8.472, 7
8. Raha III	0, 71	5.099	7.181, 7
KATOBU	12, 88	31.077	2.412, 8

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kecamatan Katobu Menurut

Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1. Raha I	1.348	1.460	2.808	92, 3
2. Laende	1.749	1.687	3.436	103, 7

3. Foo Kuni	1.509	1.718	3.227	87, 8
4. Watonea	1.697	1.942	3.639	87, 4
5. Butung- Butung	1.179	1.331	2.510	88, 6
6. Raha II	2.706	2.992	5.698	90, 4
7. Wamponiki	2.209	2.451	4.660	90, 1
8. Raha III	2.445	2.654	5.099	92, 1
KATOBU	14.842	16.235	31.077	91, 4

B. Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna

⁴Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Bapak La Ode Silat Imbo mengatakan bahwa *boka* adalah padanan dalam artian satuan nilai yang dipakai oleh Raja Muna dalam menentukan suatu harga pada zaman dahulu. *Boka* tidak hanya dipakai dalam adat perkawinan saja. Akan tetapi, satuan *boka* digunakan dalam seluruh adat istiadat suku Muna. *Boka* merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah karena *boka* tersebut diserahkan kepada bendahara untuk digunakan oleh negara, bukan digunakan oleh mempelai laki-laki. Dahulu kala, *boka* merupakan sumber utama kehidupan pemerintahan suku Muna.

⁵Adapun latar belakang adanya *boka* menurut Bapak Idorum dalam tradisi atau adat perkawinan suku Muna adalah karena pemikiran para leluhur. Salah satunya adalah Raja Sugimanuru yang memiliki kekuasaan tertinggi dan menjabat selama 15 (lima belas) tahun sebagai Raja. Total *boka* secara keseluruhan adalah 20 *boka* Muna. Hal tersebut berdasarkan hasil musyawarah adat para leluhur yang dilaksanakan di Wanci.

⁴La Ode Silat Imbo, Anak Raja Muna. Ketua Lembaga Adat Muna. *Wawancara Langsung* (05 April 2018).

⁵Idorum. Pengurus Lembaga Adat. *Wawancara Langsung* (06 April 2018).

Kuantitas atau jumlah *boka* pada adat perkawinan suku Muna sudah ada ketentuannya sejak dahulu. Penentuan tersebut berdasarkan hasil musyawarah para tetua adat terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anak cucu hingga saat ini. *Boka* adalah satuan nilai yang disebut oleh mempelai laki-laki saat ijab qabul setelah menyebut mahar. Contohnya, “Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan maskawin tersebut dan adatnya 20 boka Muna, tunai karena Allah”. Jumlah *boka* yang disebutkan oleh mempelai laki-laki tersebut tergantung pada golongan masing-masing.

⁶Menurut tokoh adat Bapak Drs. H. Syaifuddin, MA, mengatakan bahwa secara umum jumlah *boka* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Golongan Koumu adatnya 20 boka Muna. Golongan ini merupakan golongan yang memegang kekuasaan tertinggi, yaitu jabatan eksekutif.
- b. Golongan Walaka adatnya 10 boka dan 10 suku. Golongan ini merupakan golongan yang memegang jabatan legislatif dan yudikatif.
- c. Golongan Fitubengkauhano/Anangkolaki adatnya 7 boka dan 2 suku. Golongan ini merupakan golongan kepala-kepala tujuh kampung di Kabupaten Muna dahulu kala.
- d. Golongan Mowanoliwu adatnya 3 boka dan 2 suku. Golongan ini merupakan golongan penduduk asli yang pertama datang atau pribumi. Golongan ini berperan dalam pelantikan Raja.

Pernikahan yang dilakukan antar golongan memiliki jumlah bokanya masing-masing, seperti:

- a. Jika kedua mempelai berasal dari golongan Koumu, maka adatnya 20 boka Muna. Jika mempelai laki-laki berasal dari golongan lain, selain golongan Koumu, sedangkan perempuan berasal dari golongan Koumu, maka adatnya

⁶Syaifuddin. Pengurus Lembaga Adat. *Wawancara Langsung* (06 April 2018).

tetap 20 boka Muna. Hal tersebut dikarenakan mengikut dari golongan mempelai perempuan.

- b. Jika kedua mempelai berasal dari golongan Walaka, maka adatnya 10 boka dan 10 suku. Jika mempelai laki-laki berasal dari golongan ini, sedangkan perempuan berasal dari golongan selain Koumu, yaitu golongan Fitubengkauhano/Anangkolaki, maka adatnya 7 boka dan 2 suku. Sedangkan jika mempelai perempuannya berasal dari golongan Mowanoliwu, maka adatnya 3 boka dan 2 suku.
- c. Jika kedua mempelai berasal dari golongan Fitubengkauhano/Anangkolaki, maka adatnya 7 boka dan 2 suku. Jika mempelai laki-laki berasal dari golongan ini dan perempuan berasal dari golongan lain, maka adatnya mengikut pada golongan si mempelai perempuan.
- d. Jika kedua mempelai berasal dari golongan Mowanoliwu, maka adatnya 3 boka dan 2 suku. Jika mempelai laki-laki berasal dari golongan ini, sedangkan mempelai perempuan berasal dari golongan lain, maka adatnya tetap mengikut kepada golongan mempelai perempuan.
- e. Apapun jenis golongan dari mempelai laki-laki, maka mempelai laki-laki memenuhi adatnya sesuai dengan adat mempelai perempuan.
- f. Jika mempelai perempuan berasal dari golongan selain golongan Koumu, sedangkan laki-laki berasal dari golongan Koumu, maka adatnya tetap 20 boka muna. Hal tersebut merupakan ketetapan yang ada sejak dahulu.

1 boka nilainya sama dengan 24 sen (dahulu). 24 sen karena saat digenggam, muatannya 24 sen. 1 boka harganya sama dengan 1 ekor ayan jantan yang belum kawin/remaja. Namanya 24 ketip (bahasa Muna). Jika disetarakan, harga saat ini sama dengan 3 juta rupiah. Dikatan pula bahwa 1 boka sama dengan 24 sen itu karena mengikut sifat Allah dan Rasul-Nya, dimana 2 angka puluhan

dan 4 angka satuan. Allah mempunyai 20 sifat dan Rasul Allah mempunyai 4 sifat. 1 suku nilainya sama dengan 7 ribu rupiah saat ini.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna

⁷Dahulu kala, menurut Bapak H. :Ld. Aminu K., S.Ag., sistem penentuan boka ini memang bertentangan dengan syari'at Islam. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan strata sosial pada masyarakat. Di suku Muna, karena adanya penggolongan strata tersebut, maka mereka hanya boleh melakukan pernikahan sesama golongannya saja. Apa lagi golongan Koumu yang merupakan golongan bangsawan tidak boleh menikah bahkan haram hukumnya menikah dengan golongan lain terutama golongan Mowanoliwu. Golongan Mowanoliwu merupakan golongan yang paling rendah. Jika terjadi pernikahan diantara keduanya, maka golongan Mowanoliwu harus dibunuh.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi tersebut perlahan-lahan mulai hilang karena banyaknya tokoh-tokoh agama yang bergabung dalam Lembaga Adat Muna. Para tokoh agama tersebut melakukan pendekatan secara halus untuk menyampaikan bahwa apa yang selama ini mereka lakukan adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Semua manusia sama dimata Allah. Tidak ada perbedaan strata sosial apapun itu. Masyarakat Muna pelan-pelan mulai memahami bahwa apa yang mereka yakini selama ini itu salah.

⁸Menurut Bapak Drs. La Hosa, tradisi keharaman pernikahan antar golongan di suku Muna sudah tidak ada lagi kira-kira sejak tahun 1992 M. Semua golongan boleh menikah dengan golongan apapun. Hanya saja para tokoh adat

⁷Ld. Aminu K. Pengurus Lembaga Adat. *Wawancara Langsung* (07 April 2018).

⁸La Hosa. Penasihat Lembaga Adat. *Wawancara Langsung* (08 April 2018).

tidak menghilangkan adat boka yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki karena adat tersebut adalah ciri khas dari suku Muna.

⁹Ketika Islam membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah (Ketuhanan) dan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai kebiasaan di masyarakat, diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda, ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Menurut Rachmat Syafi'i, dalam hukum Islam, adat disebut juga dengan istilah '*urf*' yang secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Setiap adat atau '*urf*' akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya.

Dalam hukum Islam, adat itu terbagi dua, yaitu:¹⁰

- a. *Adat shahihah*, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.
- b. *Adat fasidah*, yaitu adat yang rusak, sebagaimana adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka adat boka adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak

⁹Misbahuddin. *Usul Fiqh II*. (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 252.

¹⁰Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Cet. 2; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 191.

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Adat boka hanya merupakan suatu tradisi yang diteruskan oleh anak cucu suku Muna agar tradisi tersebut tidak hilang dan tetap menjadi ciri khas bagi suku Muna.

D. Analisis tentang Kuantitas Boka Suku Muna

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah atau kuantitas adat boka merupakan suatu tradisi yang telah ditentukan sejak dahulu oleh para leluhur. Tradisi ini merupakan ciri khas atau identitas suku Muna yang terus dipertahankan hingga saat ini. Meskipun dahulu kala, karena adanya penentuan jumlah boka ini mengakibatkan adanya perbedaan strata sosial oleh masyarakat Muna. Mereka menganggap bahwa strata sosial sangat perlu diperhatikan untuk kelangsungan hidup ke depannya. Karena adanya penentuan jumlah boka ini pula sampai berlaku hukuman mati bagi masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh para leluhur tersebut.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi tersebut berangsur-angsur hilang dan sudah tidak berlaku lagi saat ini. Hal tersebut dikarenakan adanya pendekatan yang dilakukan oleh para tokoh agama kepada tokoh adat tersebut. Para tokoh agama sering melakukan diskusi-diskusi singkat dengan para tokoh adat tentang apa yang menjadi tradisi selama ini itu adalah salah. Allah swt. tidak pernah membedakan hambanya. Tidak ada strata sosial. Semua sama di mata Allah swt., yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaannya masing-masing.

Para tokoh adat pelan-pelan mulai memahami bahwa dengan adanya perbedaan strata sosial tersebut hanya akan menimbulkan perpecahan bagi masyarakat Muna. Adat istiadat dalam hukum Islam disebut dengan '*urf*'. Salah satu jenis '*urf*', yaitu *adat fasidah*, yaitu adat yang rusak, sebagaimana adat

kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan dengan undang-undang yang berlaku.

Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah maksudnya adalah adat boka tersebut sesuai dengan ketentuan syara' dimana dalam adat boka tidak terdapat unsur memberatkan bagi pihak laki-laki untuk memenuhi persyaratan yang sudah ada. Tidak bertentangan dengan akal sehat maksudnya adalah adat boka ini masih termasuk dalam batas kewajaran yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki. Tidak bertentangan dengan undang-undang maksudnya adalah adat boka merupakan suatu adat atau tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang yang terus dipertahankan eksistensinya hingga saat ini. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka adat boka adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Adat boka hanya merupakan suatu tradisi yang diteruskan oleh anak cucu suku Muna agar tradisi tersebut tidak hilang dan tetap menjadi ciri khas bagi suku Muna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara serta penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kuantitas atau jumlah *boka* pada adat perkawinan suku Muna sudah ada ketentuannya sejak dahulu. Penentuan tersebut berdasarkan hasil musyawarah para tetua adat terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anak cucu hingga saat ini. *Boka* adalah satuan nilai yang disebut oleh mempelai laki-laki saat ijab qabul setelah menyebut mahar. Contohnya, “Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan maskawin tersebut dan adatnya 20 boka Muna, tunai karena Allah”. Jumlah *boka* yang disebutkan oleh mempelai laki-laki tersebut tergantung pada golongan masing-masing.
2. *Adat shahihah*, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka adat *boka* adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Adat *boka*

hanya merupakan suatu tradisi yang diteruskan oleh anak cucu suku Muna agar tradisi tersebut tidak hilang dan tetap menjadi ciri khas bagi suku Muna.

B. *Implikasi Penelitian*

1. Bagi pemerintah, adat boka merupakan suatu tradisi yang menjadi ciri khas atau identitas suku Muna. Akan tetapi, tidak semua masyarakat suku Muna mengetahui hal tersebut. Maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai hal ini agar masyarakat secara keseluruhan mengetahuinya. Banyak masyarakat Muna yang belum memahami dengan baik mengenai adat boka itu sendiri. Mereka hanya mengetahui dari orang tua mereka tanpa tahu perubahannya. Hal tersebut di dukung dengan didirikannya secara formal gedung Lembaga Adat Muna yang mempunyai struktur organisasinya pula. Selama ini Lembaga Adat Muna bertempat di rumah anak Raja Muna. Struktur organisasinya pun tidak tertata baik. Pemerintah sebaiknya segera mendirikan gedung Lembaga Adat Muna agar masyarakat tau dan bisa mengunjungi jika ada yang ingin dipertanyakan seputar kewenangan Lembaga Adat Muna. Jika ada pula mahasiswa/mahasiswi yang ingin meneliti tentang adat istiadat suku Muna, maka mereka akan lebih mudah untuk meneliti karena sudah ada gedung Lembaga Adat Muna. Sosialisasi pun bisa dilakukan di gedung tersebut dan dilakukan oleh para pengurus lembaga adat.
2. Bagi masyarakat, tidak semua masyarakat mengetahui tentang adat boka ini. Maka dari itu, para orang tua perlu mempersiapkan anak-anaknya. Mereka sudah harus disosialisasikan mengenai adat istiadat dan tradisi suku Muna karena mereka adalah para penerus tradisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Cet. V; Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Ed. Revisi 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Daftary, Farhad. *Tradisi-Tradisi Intelektual Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Djazuli, H.A. dan Aen, Nurol. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Gazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Ed. 1. Cet. I; Bogor: Prenada Media 2003.
- Hadiksuma, Hilma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cet. 2; Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- Jumantoro Totok, Munawir Amin, Samsul. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Makassar: ISBN, 2013.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh II*. Cet I; Makassar: ISBN, 2015.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh*. Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

- Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nazar Bakry, Sidi. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1993.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Ed. Revisi-Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- , *Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 1. Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Ed.1 Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Ed. 1. Cet. I; Bogor: Prenada Media, 2003.
- Saebani Beni, Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet 10; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas *Boka* Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara**” bernama KHAIRAH ZUL

FITRAH, NIM: 10100114073,

Mahasiswi dari jurusan Peradilan Agama, angkatan 2014. Merupakan anak ke-5 dari 6 bersaudara. Terlahir dari pasangan suami isteri, Ayahanda

bernama Drs. H. Syaifuddin, MA dan Ibunda bernama Almh. H. Sarni Gande, S.Ag. Penulis dilahirkan di Raha, Sulawesi Tenggara pada tanggal 20 September 1996.



Penulis sempat menapaki jenjang pendidikan di SDN 15 Katobu tahun 2005, kemudian pindah ke SDN 28 Katobu tahun 2006 - 2008, kemudian pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTsN Raha tahun 2009 dan pindah ke MTs Ummu Shabri Kendari tahun 2010 – 2011, kemudian lanjut di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari pada Tahun 2011-2014. Pada tahun yang sama, yakni 2014 Penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri yakni di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui seleksi SBMPTN dan lulus di Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Keluarga.